

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Kontrak Karya antara Pemerintah dengan PTFI setelah berlakunya PP 1 Tahun 2017 sebagaimana yang sudah diubah menjadi PP 8 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak selama tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Frasa ini termasuk mineral tambang yang terkandung di dalam wilayah Indonesia juga dikuasai negara untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Kepentingan kesejahteraan rakyat merupakan kepentingan tertinggi yang tidak boleh dikesampingkan oleh adanya Kontrak Karya tersebut. Mengingat keberadaan Kontrak Karya antara Pemerintah dengan PTFI di bidang pertambangan tidak berorientasi pada kepentingan kesejahteraan rakyat, maka Kontrak Karya tersebut boleh direvisi atau dialihkan menjadi izin usaha pertambangan khusus.

Di samping itu, frasa “berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak” tidak harus ditafsirkan bahwa Kontrak Karya tersebut sama artinya dengan Undang-Undang sebagaimana ditegaskan dalam hierarki tata urutan

peraturan perundang-undangan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

B. Saran

1. Pemerintah perlu tetap menindak lanjuti pengalihan Kontrak Karya menjadi izin usaha pertambangan khusus bagi kegiatan bisnis pertambangan PTFI di Indonesia.
2. Pemerintah perlu merevisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk lebih menegaskan posisi Pemerintah sebagai pemegang mandat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dalam bidang pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Handoyo B. Hestu Cipto, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Adma Jaya, Yogyakarta.
- Hartono Sunaryati, *Makna Nilai-Nilai Falsafah di Dalam Pancasila Sebagai Weltanschauung Bangsa dan Negara Republik Indonesia*, Majalah Hukum Nasional.
- H.S., Salim, 2014 *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- H.S., Salim, 2014, *Perkembangan Hukum Kontrak innominaat di Indonesia Buku Kesatu*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Projodikoro Wirjono, 1981, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rudiyanto Ellen Vembrey, 2016, *Kepastian Hukum Kewajiban Divestasi Saham Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Terhadap Kontrak Karya Pt. PTFI Indonesia*, Universitas Tarumanagara, Jakarta.
- Saleng, Abrar, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta.
- Setiawan, R, 1999, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra A Bardin, Bandung.
- Subekti, R, 1982, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Suhardana, F.X., 2013, *Contract Drafting: Kerangka Dasar dan Teknik Penyusun Kontrak (Edisi Revisi)*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian*, Prenada Media, Jakarta.
- Suredi, Adrian, 2012, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Trihastuti Nanik, 2013, *Hukum Kontrak Karya*, Penerbit Setara Press, Malang.

Vollmar, H.F.A., 1984, *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid II*, Rajawali Press, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Internet :

Ahmad Sulthon, Menteri Esdm Blak-Blakan Soal Divestasi PTFI, <https://newsplus.antvklik.com/news/menteri-esdm-blak-blakan-soal-divestasi-PTFI>, diakses 17 Agustus 2019.

Achmad Yusron Arif, Pengertian Pemerintahan Di Negara Indonesia, <https://rocketmanajemen.com/definisi-pemerintahan-indonesia/#a>, diakses 17 Oktober 2018.

Adityo Ariwibowo, Sekilas Tentang Perjanjian/Kontrak, <https://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/01/29/sekilas-tentangperjanjiankontrak/>, diakses 8 Agustus 2019.

Adiatmaputra Fajar Pratama, Menteri Jonan: Tidak Ada Perlakuan Istimewa untuk PTFI, <https://www.tribunnews.com/bisnis/2017/03/30/menteri-jonan-tidak-ada-perlakukan-istimewa-untuk-PTFI>, diakses 17 Agustus 2019.

DetikFinance, Pemerintah Harus Berani Minta Bagi Hasil ke Perusahaan Tambang, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1740669/pemerintah-harus-berani-minta-bagi-hasil-ke-perusahaan-tambang>, diakses 4 Oktober 2018.

Damang Averroes Al-Khawarizmi, Asas-asas Perjanjian, www.negarahukum.com/hukum/asas-asas-perjanjian.html, diakses 8 Agustus 2019.

Erireza, Macam-Macam Asas Hukum Berdasarkan Pasal 1320 KUH Dan Pasal 1338, <https://erireza21.wordpress.com/2017/12/15/macam-macam-asas-hukum-pasal-1320-kuh-dan-pasal-1338/>, diakses 18 Agustus 2019.

Finansialku, Definisi Divestasi Adalah, <https://www.finansialku.com/divestasi-adalah/> diakses 7 Agustus 2019.

Gustidha Budiartie, CNBC Indonesia, Riwayat Divestasi PTFI ke Indonesia, <https://www.cmbcindonesia.com/news/20180112160028-4-1350/riwayat-divestasi-PTFI-ke-indonesia>, diakses 7 Agustus 2019. *Ahmad Sulthon*, Menteri Esdm Blak-Blakan Soal Divestasi PTFI, <https://newsplus.antvklik.com/news/menteri-esdm-blak-blakan-soal-divestasi-PTFI>, diakses 17 Agustus 2019.

<http://everythingaboutvanrush88.blogspot.com/2015/03/pengertian-hukum-pertambangan-dan-ruang.html>, diakses 9 November 2018.

<https://www.kajianpustaka.com/2018/12/pengertian-jenis-asas-dan-tahapan-pertambangan.html>, diakses 9 November 2018.

Jimly Assididqie, “Peran Konstitusional Keadilan Sosial”, Makalah, Malang, http://www.jimly.com/makalah/namafile/151/PESAN_KE-ADILAN_SOSIAL, diakses 23 September 2019.

Mardiana, Kontrak Karya Freeport: Kontrak Publik Atau Privat?, <https://news.detik.com/opini/d-3451353/kontrak-karya-freeport-kontrak-publik-atau-privat>, diakses 18 Agustus 2019.

Redaksi, Penandatanganan Perjanjian Divestasi Saham PT Freeport Indonesia, <http://sinarkeadilan.com/penandatanganan-perjanjian-divestasi-saham-pt-freeport-indonesia/>, diakses 4 Oktober 2018.

Wikipedia bahasa Indonesia, Freeport Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Freeport_Indonesia, diakses tanggal 17 Oktober 2018.